

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	
I. PENJELASAN UMUM	
II. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BANK PERKREDITAN RAKYAT	
A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola	
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	1
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2
4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	5
a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite	5
b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite ..	6
c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite	6
B. Kepemilikan Saham Anggota Direksi	
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR	7
2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain	7
C. Hubungan Keuangan Dan/Atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi	
1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR	8
2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR	8
D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris	
1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR	8
2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain	9
E. Hubungan Keuangan Dan/Atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris	
1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR	9
2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR	9
F. Paket/Kebijakan Remunerasi Dan Fasilitas Lain	
1. Paket/Kebijakan bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS	10
2. Uraian fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS	10
G. Rasio Gaji Tertinggi Dan Terendah	11
H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	
1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun	11
a. Rapat Dewan Komisaris	11
b. Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi	14
2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris	15
I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud).....	16
J. Jumlah Permasalahan Hukum	16
K. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan	16
L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial Dan/Atau Kegiatan Politik	17
III. LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE	
A. Hasil Penilaian (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola	18
B. Kesimpulan Umum Hasil Penerapan Tata Kelola	18

LEMBAR PERSETUJUAN

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

**Laporan Penerapan Tata Kelola
PT. BPR UTOMO MANUNGGAL SEJAHTERA LAMPUNG
Tahun 2021**

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

- 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 31 Maret 2015;
- 2 Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 10 Maret 2016.
- 3 Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 24 / SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 14 Desember 2020;

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT BPR UTOMO MANUNGGAL SEJAHTERA LAMPUNG selama tahun 2021. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri perbankan khususnya BPR.

Bandar Lampung, 27 April 2022

PT. BPR UTOMO MANUNGGAL SEJAHTERA LAMPUNG

Menyetujui



Welly Sucipto
Komisaris Utama



Rudy Hasanudin
Direktur Utama

BAB I

PENJELASAN UMUM

Di tengah pemulihan atas dampak pandemi COVID-19 yang masih menekan dunia usaha dan perbankan, BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung mampu menunjukkan kinerja yang baik meskipun tantangan yang dihadapi tidaklah ringan disepanjang tahun 2021. Hal ini dapat dilalui dengan menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) di PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung (BPR Utomo) secara berkesinambungan.

BPR Utomo yang telah beroperasi sejak tahun 2008 memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan GCG sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga BPR Utomo dapat terus tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan khususnya di Provinsi Lampung.

Dalam menerapkan GCG, BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung selalu senantiasa berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar Tata Kelola, yaitu Transparansi (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Pertanggungjawaban (Responsibility), Independensi (Independency), dan Kewajaran (Fairness). Hal ini didorong oleh komitmen Bank untuk menyediakan layanan perbankan yang terpercaya dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan dukungan SDM yang kompeten untuk menciptakan nilai tambah bagi para nasabah. Implementasi pelaksanaan GCG di BPR Utomo meliputi aspek Governance Structure, Governance Process, dan Governance Outcome yang merupakan satu rangkaian yang saling terkait sehingga menjadi suatu siklus GCG yang berkesinambungan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan para Pemangku Kepentingan (stakeholders).

Pelaksanaan GCG di Bank Utomo Lampung secara konsisten akan terus diimplementasikan dari waktu ke waktu (continuous improvement) dalam rangka memberikan hasil berupa sustainable value yang akan meningkatkan kinerja Bank Utomo Lampung secara keseluruhan sehingga dapat mewujudkan visi dan misi Bank Utomo Lampung dan berkontribusi pada pengembangan industri keuangan mikro di Indonesia khususnya di Provinsi Lampung.

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BANK PERKREDITAN RAKYAT

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana diatur pada POJK di atas, Direksi memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Anggota Direksi yang mengatur tugas dan kewajiban Direksi serta tata tertib penyelenggaraan rapat Direksi, secara umum mengatur hal-hal berikut ini:

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	<p>Nama : Rudy Hasanudin</p> <p>Jabatan : Direktur Utama</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <p>a. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.</p> <p>b. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menghimpun dana; 2) Menyalurkan kredit; 3) Menempatkan dana pada bank lain; 4) Menerima penempatan dana dari bank lain;

No		Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
		5)	Menerima pinjaman dari bank lain atau lembaga non bank atas persetujuan Dewan Komisaris.
		c.	Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
		d.	Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2	Nama	:	Cinthya Liany Wijaya
	Jabatan	:	Direktur Operasional
	Tugas dan Tanggung Jawab	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu Direktur Utama dalam pengelolaan dan pengawasan operasional BPR. b. Memastikan dan meningkatkan tata-tertib dan disiplin kerja. c. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. d. Membudayakan kepatuhan dan sadar risiko.
3	Nama	:	Fitri Yanti
	Jabatan	:	Direktur Kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu Direktur Utama dalam pengawasan operasional BPR. b. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. c. Membawahkan fungsi kepatuhan, fungsi manajemen risiko, APU-PPT dan Sumber Daya Manusia. d. Memastikan dan meningkatkan tata-tertib dan disiplin kerja. e. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai. f. Membudayakan kepatuhan dan sadar risiko. g. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :			
Direksi telah berupaya penuh untuk melaksanakan rekomendasi Dewan Komisaris, dengan terus menerapkan kebijakan dan prosedur sesuai dengan ketentuan regulator maupun internal dengan baik, diantaranya antara lain:			
<ol style="list-style-type: none"> 1) mengusahakan kelengkapan komisaris independen dengan mengajukan penambahan anggota direksi terlebih dahulu. 2) Meningkatkan pengendalian intern dengan meningkatkan kapasitas pejabat dan melengkapi ketentuan intern BPR. 3) Peningkatan penyelesaian NPL bank guna menekan rasio NPL sehingga menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. 4) Mempersiapkan implementasi mobile banking untuk mendukung pengembangan produk yang menambah nilai tambah bagi nasabah. 5) Menggiatkan pengkinian data nasabah guna meningkatkan penerapan APU PPT. 6) Pengembangan kompetensi SDM melalui pelatihan maupun edukasi selaras dengan rencana bisnis BPR. 7) Likuiditas BPR selalu terjaga dengan baik selama masa pandemi Covid-19. 			

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang memiliki tugas pokok untuk melakukan pengawasannya atas kebijakan Direksi dalam menjalankan perusahaan, dan memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris juga bertugas untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) dalam setiap kegiatan usaha BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung sebagaimana diatur pada ketentuan perundang-undangan perbankan Indonesia, Dewan Komisaris memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan

Komisaris yang mengatur tugas dan kewajiban Dewan Komisaris serta tata tertib penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris. Tugas dan tanggung jawab anggota Komisaris adalah sebagai berikut:

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1	<p>Nama : Welly Sucipto</p> <p>Jabatan : Komisaris Utama</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memimpin Dewan Komisaris. b. Melakukan pengawasan dengan mengarahkan, memantau dan mengevaluasi terhadap kebijakan pengurusan serta pelaksanaan kebijakan strategis bank oleh Direksi. c. Memberikan nasehat kepada Direksi dalam melaksanakan kepengurusan BPR; d. Memberikan pendapat dan persetujuan rencana bisnis BPR, serta rencana lainnya yang disiapkan Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar; e. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh; f. Mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan BPR; g. Melaporkan kepada BPR mengenai kepemilikan sahamnya dan/ atau keluarganya pada Bank dan Perseroan lain; h. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar; i. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan penerapan tata kelola dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. j. Membentuk paling sedikit Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko. k. Memastikan bahwa perseroan telah memenuhi segala peraturan perundang-undangan dan standar transparansi yang berlaku; l. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan aktif terhadap penerapan program Anti Pencucian uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU dan PPT) pada BPR.
2	<p>Nama : Lunto Hasan</p> <p>Jabatan : Komisaris</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Membantu Komisaris Utama dalam menjalankan tugasnya. b. Melakukan pengawasan dengan mengarahkan, memantau dan mengevaluasi terhadap kebijakan pengurusan serta pelaksanaan kebijakan strategis bank oleh Direksi. c. Memberikan nasehat kepada Direksi dalam melaksanakan kepengurusan BPR; d. Memberikan pendapat dan persetujuan rencana bisnis BPR, serta rencana lainnya yang disiapkan Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar; e. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh; f. Mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan BPR; g. Melaporkan kepada BPR mengenai kepemilikan sahamnya dan/ atau keluarganya pada Bank dan Perseroan lain; h. Mengikuti rapat Dewan Komisaris; i. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan penerapan tata kelola dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. j. Dapat menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko. k. Memastikan bahwa perseroan telah memenuhi segala peraturan perundang-undangan dan standar transparansi yang berlaku;

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
	1. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan aktif terhadap penerapan program Anti Pencucian uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU dan PPT) pada BPR
3	<p>Nama : Afit Syidik Priyatna</p> <p>Jabatan : Komisaris Independen</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ol style="list-style-type: none"> Membantu Komisaris Utama dalam menjalankan tugasnya. Melakukan pengawasan dengan mengarahkan, memantau dan mengevaluasi terhadap kebijakan pengurusan serta pelaksanaan kebijakan strategis bank oleh Direksi. Memberikan nasehat kepada Direksi dalam melaksanakan kepengurusan BPR; Memberikan pendapat dan persetujuan rencana bisnis BPR, serta rencana lainnya yang disiapkan Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar; Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh; Mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan BPR; Melaporkan kepada BPR mengenai kepemilikan sahamnya dan/ atau keluarganya pada Bank dan Perseroan lain; Mengikuti rapat Dewan Komisaris; Memastikan terselenggaranya pelaksanaan penerapan tata kelola dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dapat menjadi Ketua Komite Audit dan Ketua Komite Pemantau Risiko. Memastikan bahwa perseroan telah memenuhi segala peraturan perundang-undangan dan standar transparansi yang berlaku; Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan aktif terhadap penerapan program Anti Pencucian uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU dan PPT) pada BPR.
Rekomendasi Kepada Direksi :	
<p>Selama Tahun 2021 Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi kepada Direksi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Agar BPR memenuhi Tata Kelola yang baik, Direksi perlu mengupayakan penambahan Komisaris Independen. Bank dapat terus meningkatkan pengendalian intern yang dilakukan saat ini sehingga dapat memitigasi risiko dari seluruh kegiatan operasional bank. Pengendalian intern bank juga perlu ditingkatkan khususnya pengawasan dari pejabat dan pengurus dimana manajemen perlu update dan lebih aktif dalam pengawasan dan penyediaan ketentuan sebagai dasar acuan kegiatan operasional bank. Direksi agar memonitoring secara ketat seluruh rencana penyelesaian kredit bermasalah dan penekanan NPL sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan. Direksi agar melakukan inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung proses kerja dan menyediakan produk-produk unggulan yang mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat dari sisi lending maupun funding. Direksi agar mengembangkan/meningkatkan sistem informasi bank untuk menunjang penerapan Program APU-PPT, Meningkatkan sistem pengendalian intern penerapan program APU-PPT melalui pelaksanaan audit oleh SKAI secara berkala dan dilaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, serta ditembuskan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, dan meningkatkan pemahaman SDM bank terhadap ketentuan penerapan program APU-PPT melalui pelatihan yang berkelanjutan. Direksi agar seoptimal mungkin untuk dapat memberikan pembekalan pelatihan maupun edukasi kepada SDM untuk meningkatkan kompetensi SDM dibidang perbankan, sehingga dapat meningkatkan mutu dan kualitas SDM guna mendukung tercapainya rencana bisnis kedepan. Direksi agar tetap menjaga likuiditas bank serta memastikan rasio-rasio keuangan bank tetap terjaga diatas ketentuan regulator dan ketentuan internal bank. 	

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat pasal 32 ayat 1, yaitu dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko di tahun 2017.

Pada tahun 2021 Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1	<p>Komite Audit</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab:</p> <p>a) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.</p> <p>b) Dalam rangka melaksanakan tugas pada butir tersebut di atas dan guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Audit paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan tugas Divisi Audit Internal; • Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku; • Kesesuaian Laporan Keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; • Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan Divisi Audit Internal, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Otoritas lain. <p>c) Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.</p> <p>d) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.</p>
2	<p>Komite Pemantau Risiko</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab:</p> <p>a) Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.</p> <p>b) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen risiko.</p>
<p>Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite</p>	
<p>Pada tahun 2021 Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukkan Akuntan Publik dan/ atau Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.</p>	

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No	Nama	Keahlian	Komite		Pihak Independen (Ya/Tidak)
			Audit	Pemantau Risiko	
1	Welly Sucipto	Komisaris Utama	Anggota	Anggota	Tidak
2	Lunto Hasan	Komisaris	Anggota	Anggota	Tidak
3	Afit Syidik Priyatna	Komisaris	Ketua	Ketua	Ya
4	Arie Sandy Rachim	Akuntansi, Audit, Hukum dan Perpajakan	Anggota	Anggota	Ya
5	Bey Sujarwo	Hukum	Anggota	Tidak Menjabat	Ya
6	R. Harlistyanto	Perbankan dan Teknologi Informasi	Tidak Menjabat	Anggota	Ya
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite					
Struktur, keanggotaan, keahlian dan independensi anggota komite telah memadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku					

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1	<p>Komite Audit</p> <p>Program Kerja : Program Kerja Komite Audit Tahun 2021 sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit. 2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. 3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas satuan kerja audit intern. 4. Memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit. 5. Memantau dan mengevaluasi kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku bagi BPR. 6. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit intern atau pejabat yang menangani audit intern, akuntan publik dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain. 7. Memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan/atau kantor akuntan publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. 8. Membahas dan memberikan saran dan usulan terkait hal-hal strategis yang dinilai dapat mengganggu kinerja perusahaan. <p>Realisasi : Program Kerja Komite Audit Tahun 2021 seluruhnya telah dipenuhi yang tertuang dalam Risalah Rapat Komite Audit yang diselenggarakan pada tanggal 26 Maret 2021, 31 Mei 2021, 30 Agustus 2021, dan 29 November 2021.</p> <p>Jumlah Rapat : 4</p>
2	Komite Pemantau Risiko

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
	<p>Program Kerja : Program Kerja Komite Pemantau Risiko Tahun 2021 sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. 2. Mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. 3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko. 4. Memantau dan mengevaluasi rencana penyediaan layanan mobile banking. 5. Memantau dan mengevaluasi hasil stress test atas dampak restrukturisasi kredit terhadap permodalan. 6. Membahas dan memberikan saran dan mitigasi risiko terkait potensi-potensi risiko yang dapat mengganggu kinerja perusahaan.
	<p>Realisasi : Program Kerja Komite Pemantau Risiko Tahun 2021 seluruhnya telah terpenuhi yang tertuang dalam Risalah Rapat Komite Pemantau Risiko yang diselenggarakan pada tanggal 26 Maret 2021, 31 Mei 2021, 30 Agustus 2021, dan 29 November 2021.</p>
	<p>Jumlah Rapat : 4</p>
Penjelasan Lebih Lanjut	
BPR Utomo baru membentuk 2 (dua) Komite Dewan Komisaris yaitu Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko	

B. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung:

Berdasarkan Akta Pendirian yang dirubah terakhir kali dengan Akta Notaris No. 10 tertanggal 29 Nopember 2021 maka Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung adalah sebagai berikut:

No	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Rudy Hasanudin	6.300.200.000	2,52%
2	Cinthya Liany Wijaya	-	0,00%
3	Fitri Yanti	-	0,00%

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain:

No	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Rudy Hasanudin	602679001	PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Sumsel	5,00%

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung:

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Rudy Hasanudin	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Cinthy Liany Wijaya	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Fitri Yanti	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh anggota Direksi BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/ atau Pemegang Saham Pengendali yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.				

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung:

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Rudy Hasanudin	Tidak Ada	Tidak Ada	Thamrin Wahyu Utomo – Kakak Ipar
2	Cinthy Liany Wijaya	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Fitri Yanti	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Mayoritas anggota Direksi BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali.				

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung

Berdasarkan Akta Pendirian yang dirubah terakhir kali dengan Akta Notaris No. 10 tertanggal 29 Nopember 2021 maka kepemilikan saham anggota dewan Komisaris pada BPR Utomo adalah sebagai berikut:

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Welly Sucipto	-	0,00%
2	Lunto Hasan	18.149.300.000	7,26%
3	Afit Syidik Priyatna	-	0,00%

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Welly Sucipto	602679001	PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Sumsel	5,00%
		-	PT. Metro Multi Piranti	25,00%
		-	PT. Utomo Sejahtera Bersama Grago Kertaraharja	5,00%
2	Lunto Hasan	602679001	PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Sumsel	17,50%
		-	PT. Mitra Utomo Motor	26,00%
		-	PT. Aneka Adi Sarana	40,00%
		-	PT. Utomo Sejahtera Bersama	25,00%
		-	PT. Utomo Sejahtera Bersama Grago	22,50%
		-	PT. Utomo Sejahtera Bersama Grago Selubuk	25,00%
		-	PT. Jaga Sakti	25,00%
		-	PT. Utomo Sejahtera Bersama Grago Kertaraharja	25,35%

E. Hubungan Keuangan Dan/Atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung:

Mayoritas anggota Dewan Komisaris BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung tidak memiliki hubungan keuangan dengan sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Hanya Saudara Lunto Hasan yang memiliki hubungan keuangan dengan pemegang saham pengendali BPR Utomo karena menerima penghasilan dari perusahaan-perusahaan yang pemegang saham pengendalinya adalah Saudara Thamrin Wahyu Utomo dan Sdr. Haryono Utomo.

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Welly Sucipto	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Lunto Hasan	Tidak Ada	Tidak Ada	Thamrin Wahyu Utomo – Perusahaannya memberikan Penghasilan, Haryono Utomo – Perusahaannya memberikan Penghasilan,
3	Afit Syidik Priyatna	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung:

Seluruh anggota Dewan Komisaris BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris,

anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Welly Sucipto	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Lunto Hasan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Afit Syidik Priyatna	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi Dan Fasilitas Lain Bagi Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Ditetapkan Berdasarkan Rups

Struktur Remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji *)	3	1.263.896.543,-	3	1.289.520.000,-
2	Tunjangan	3	2.124.736.468,-	3	1.231.900.400,-
3	Tantiem	3	584.437.412,-	3	314.697.068,-
4	Kompensasi berbasis saham	-	-	-	-
5	Remunerasi lainnya **)	-	-	-	-
Total			3.973.070.423,-		2.836.117.468,-

*) Gaji merupakan gaji pokok, tidak termasuk tunjangan yang diterima Direksi dan Dewan Komisaris serta keluarga.

**) Remunerasi lainnya bagi pengurus BPR dan ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain (dalam 1 tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Sewa Rumah (1)	-
2	Transportasi	Mobil Dinas (3)	Mobil Dinas (2)
3	Asuransi Kesehatan	-	-
4	Fasilitas Lainnya	Fasilitas Kesehatan (3) Tunjangan Komunikasi (3)	Fasilitas Kesehatan (3) Tunjangan Komunikasi (3)

Fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris telah sesuai dengan RUPS.

G. Rasio Gaji Tertinggi Dan Terendah

Keterangan *)	Perbandingan	
	(a/b)	: 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	6,82	: 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,33	: 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	2,13	: 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	0,87	: 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2,19	: 1

*) Gaji yang dimaksud merupakan gaji keseluruhan yang diterima mencakup gaji pokok dan tunjangan dalam 1 (satu) tahun.

Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan gaji pegawai yang terendah dilaporkan dalam pecahan terkecil.

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

Selama tahun 2021 Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 19 (Sembilan belas) kali rapat yang terdiri dari 12 (dua belas) kali Rapat Dewan Komisaris (*Board of Commissioners Meeting*) dan 7 (tujuh) kali Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi yang dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan seluruh Direksi.

a. Rapat Dewan Komisaris

No	Tanggal	Peserta Rapat Dewan Komisaris	Topik/Materi Pembahasan
1	08/01/2021	1. Welly Sucipto 2. Lunto Hasan 3. Afit Syidik Priyatna	1. Agenda evaluasi perkembangan usaha dan realisasi rencana bisnis bank tahun 2020. 2. Agenda evaluasi penerapan tata kelola bank dan APU PPT. 3. Agenda penilaian efektivitas Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko. 4. Agenda pembahasan hasil pengarah dan pemantauan rencana pengembangan & pengadaan teknologi informasi BPR yang bersifat mendasar dan hasil evaluasi pertanggungjawaban Direksi terkait penyelenggaraan Teknologi Informasi BPR Utomo. 5. Agenda evaluasi pelaksanaan kebijakan relaksasi kredit bagi debitur yang terkena dampak pandemi Covid-19. 6. Rekomendasi upaya atau langkah untuk mengoptimalkan kinerja bank. 7. Rekomendasi upaya untuk peningkatan penerapan APU PPT 8. Rekomendasi upaya untuk peningkatan pemantauan kegiatan teknologi informasi.
2	11/02/2021	1. Welly Sucipto 2. Lunto Hasan 3. Afit Syidik Priyatna	1. Agenda evaluasi perkembangan usaha dan realisasi rencana bisnis bank bulan Januari 2021 2. Agenda pembahasan atas Batas Maksimum Pemberian Kredit Semester II Tahun 2020 3. Agenda Evaluasi Limit Risiko bank sampai dengan bulan Desember 2020 4. Agenda pembahasan review serta saran dari Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dimana hasil review serta saran akan diteruskan kepada Direksi melalui surat Dewan Komisaris untuk ditanggapi.

No	Tanggal	Peserta Rapat Dewan Komisaris	Topik/Materi Pembahasan
			5. Rekomendasi dari Dewan Komisaris untuk mengoptimalkan pencapaian rencana bisnis bank pada bulan-bulan selanjutnya serta upaya penyelesaian dan penekanan NPL bank.
3	30/03/2021	1. Welly Sucipto 2. Lunto Hasan 3. Afit Syidik Priyatna	1. Agenda evaluasi perkembangan usaha dan realisasi rencana bisnis bank bulan Februari 2021. 2. Agenda pembahasan Limit Risiko Bank sampai dengan bulan Februari 2021. 3. Agenda rekomendasi penunjukkan AP dan/atau KAP untuk pemeriksaan laporan keuangan tahun buku 2021 dan membahas saran dari Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko. 4. Rekomendasi dari Dewan Komisaris untuk mengoptimalkan pencapaian rencana bisnis bank pada bulan-bulan selanjutnya.
4	19/04/2021	1. Welly Sucipto 2. Lunto Hasan 3. Afit Syidik Priyatna	1. Agenda evaluasi perkembangan usaha dan realisasi rencana bisnis bank sampai dengan bulan Maret 2021. 2. Agenda pembahasan Limit Risiko Bank sampai dengan bulan Maret 2021. 3. Agenda pembahasan mengenai hasil pengawasan atas pelaksanaan penerapan APU PPT bank. 4. Agenda evaluasi pelaksanaan kebijakan relaksasi kredit bagi debitur yang terkena dampak pandemi Covid-19. 5. Rekomendasi dari Dewan Komisaris terkait upaya untuk mengoptimalkan pencapaian laba serta pemantauan likuiditas selama pandemi. 6. Rekomendasi upaya untuk peningkatan penerapan APU PPT
5	18/05/2021	1. Welly Sucipto 2. Lunto Hasan 3. Afit Syidik Priyatna	1. Agenda evaluasi perkembangan usaha dan realisasi rencana bisnis bank sampai dengan bulan April 2021. 2. Agenda pembahasan Limit Risiko sampai dengan bulan April 2021. 3. Agenda pembahasan review serta saran dari Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dimana hasil review serta saran akan diteruskan kepada Direksi melalui surat Dewan Komisaris untuk ditanggapi. 4. Rekomendasi dari Dewan Komisaris untuk mengoptimalkan pencapaian rencana bisnis bank pada bulan-bulan selanjutnya serta upaya penyelesaian dan penekanan NPL bank. 5. Rekomendasi dari Dewan Komisaris untuk pembekalan serta edukasi kepada seluruh karyawan.
6	03/06/2021	1. Welly Sucipto 2. Lunto Hasan 3. Afit Syidik Priyatna	1. Agenda evaluasi perkembangan usaha dan realisasi rencana bisnis bank sampai dengan bulan Mei 2021. 2. Agenda pembahasan Limit Risiko sampai dengan bulan Mei 2021. 3. Agenda pembahasan review serta saran dari Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dimana hasil review serta saran akan diteruskan kepada Direksi melalui surat Dewan Komisaris untuk ditanggapi. 4. Agenda evaluasi pelaksanaan kebijakan relaksasi kredit bagi debitur yang terkena dampak pandemi Covid-19. 5. Rekomendasi dari Dewan Komisaris untuk mengoptimalkan pencapaian rencana bisnis bank pada bulan-bulan selanjutnya serta upaya penyelesaian dan penekanan NPL bank.
7	16/07/2021	1. Welly Sucipto 2. Lunto Hasan 3. Afit Syidik Priyatna	1. Agenda evaluasi perkembangan usaha dan realisasi rencana bisnis bank sampai dengan bulan Juni 2021. 2. Agenda pembahasan atas Batas Maksimum Pemberian Kredit Semester I Tahun 2021. 3. Agenda Evaluasi Limit Risiko bank sampai dengan bulan Juni 2021 serta penerapan APU PPT Semester I Tahun 2021. 4. Agenda pembahasan hasil pengarah dan pemantauan rencana pengembangan & pengadaan teknologi informasi BPR yang bersifat mendasar dan hasil evaluasi

No	Tanggal	Peserta Rapat Dewan Komisaris	Topik/Materi Pembahasan
			<p>pertanggungjawaban Direksi terkait penyelenggaraan Teknologi Informasi BPR Utomo.</p> <ol style="list-style-type: none"> Agenda evaluasi pelaksanaan kebijakan relaksasi kredit bagi debitur yang terkena dampak pandemi Covid-19. Rekomendasi upaya untuk peningkatan penerapan APU PPT. Rekomendasi upaya untuk peningkatan pemantauan kegiatan teknologi informasi. Rekomendasi dari Dewan Komisaris untuk mengoptimalkan pencapaian rencana bisnis bank pada bulan-bulan selanjutnya.
8	06/08/2021	<ol style="list-style-type: none"> Welly Sucipto Lunto Hasan Afit Syidik Priyatna 	<ol style="list-style-type: none"> Agenda evaluasi perkembangan usaha dan realisasi rencana bisnis bank sampai dengan bulan Juli 2021. Agenda pembahasan Limit Risiko sampai dengan bulan Juli 2021. Agenda pembahasan review serta saran dari Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dimana hasil review serta saran akan diteruskan kepada Direksi melalui surat Dewan Komisaris untuk ditanggapi. Rekomendasi dari Dewan Komisaris untuk mengoptimalkan pencapaian rencana bisnis bank pada bulan-bulan selanjutnya.
9	09/09/2021	<ol style="list-style-type: none"> Welly Sucipto Lunto Hasan Afit Syidik Priyatna 	<ol style="list-style-type: none"> Agenda evaluasi perkembangan usaha dan realisasi rencana bisnis bank sampai dengan bulan Agustus 2021. Agenda pembahasan Limit Risiko sampai dengan bulan Agustus 2021. Rekomendasi dari Dewan Komisaris untuk mengoptimalkan pencapaian rencana bisnis bank pada bulan-bulan selanjutnya.
10	08/10/2020	<ol style="list-style-type: none"> Welly Sucipto Lunto Hasan Afit Syidik Priyatna 	<ol style="list-style-type: none"> Agenda evaluasi perkembangan usaha dan realisasi rencana bisnis bank sampai dengan bulan September 2021. Agenda pembahasan Limit Risiko sampai dengan bulan September 2021. Agenda pembahasan mengenai hasil pengawasan atas pelaksanaan penerapan APU PPT bank. Agenda evaluasi pelaksanaan kebijakan relaksasi kredit bagi debitur yang terkena dampak pandemi Covid-19. Agenda pembahasan review serta saran dari Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dimana hasil review serta saran akan diteruskan kepada Direksi melalui surat Dewan Komisaris untuk ditanggapi. Rekomendasi dari Dewan Komisaris untuk mengoptimalkan pencapaian rencana bisnis bank pada bulan-bulan selanjutnya.
11	09/11/2021	<ol style="list-style-type: none"> Welly Sucipto Lunto Hasan Afit Syidik Priyatna 	<ol style="list-style-type: none"> Agenda evaluasi perkembangan usaha dan realisasi rencana bisnis bank sampai dengan bulan Oktober 2021. Agenda pembahasan Limit Risiko sampai dengan bulan Oktober 2021. Rekomendasi dari Dewan Komisaris untuk mengoptimalkan pencapaian rencana bisnis bank pada bulan-bulan selanjutnya.
12	10/12/2021	<ol style="list-style-type: none"> Welly Sucipto Lunto Hasan Afit Syidik Priyatna 	<ol style="list-style-type: none"> Agenda evaluasi perkembangan usaha dan realisasi rencana bisnis bank sampai dengan bulan November 2021. Agenda pembahasan rencana bisnis bank tahun 2022 yang diajukan oleh Direksi. Keputusan bahwa Dewan Komisaris menyetujui rencana bisnis bank tahun 2022 yang diajukan oleh Direksi. Rekomendasi dari Dewan Komisaris dalam hal penyusunan rencana bisnis bank tahun 2022.

b. Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

No	Tanggal	Peserta Rapat Gabungan	Topik/Materi Pembahasan
1	25/01/2021	1. Welly Sucipto 2. Lunto Hasan 3. Afit Syidik Priyatna 4. Rudy Hasanudin 5. Fitri Yanti 6. Cinthya Liany Wijaya	1. Agenda pembahasan mengenai penyesuaian susunan keanggotaan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko. 2. Agenda pembahasan mengenai pemenuhan posisi Direktur Bisnis dan Komisaris Independen. 3. Agenda pembahasan mengenai penerapan APU PPT di lingkungan kerja dan menu APU PPT yang dibutuhkan oleh bank pada CBS Teradata. 4. Keputusan penyesuaian susunan keanggotaan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko. 5. Keputusan untuk pemenuhan pengurus yang telah dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank Tahun 2021 dapat dipertimbangkan berdasarkan kompetensi dan ketentuan yang berlaku. 6. Keputusan untuk penerapan APU PPT yang lebih optimal, bank akan memberikan pendidikan dan refreshment kepada petugas dan pejabat.
2	24/02/2021	1. Welly Sucipto 2. Lunto Hasan 3. Afit Syidik Priyatna 4. Rudy Hasanudin 5. Fitri Yanti 6. Cinthya Liany Wijaya	1. Agenda pembahasan penyesuaian rencana bisnis bank tahun 2021. 2. Agenda pembahasan Self Assessment atas potensi kerugian restrukturisasi kredit terdampak Covid-19. 3. Keputusan bahwa seluruh peserta rapat menyetujui penyesuaian rencana bisnis bank tahun 2021 dapat dilakukan oleh bank. 4. Keputusan untuk melakukan self assesment dan stress test terhadap potensi kerugian atau dampak dari restrukturisasi kredit bagi debitur yang terkena dampak Covid-19 sesuai dengan saran dari Otoritas Jasa Keuangan.
3	17/02/2020	1. Welly Sucipto 2. Lunto Hasan 3. Afit Syidik Priyatna 4. Rudy Hasanudin 5. Fitri Yanti 6. Cinthya Liany Wijaya	1. Agenda pembahasan rancana alih media dokumen ke core banking system sebagai langkah efisiensi waktu dalam hal verifikasi identitas nasabah saat melakukan transaksi keuangan di bank. 2. Agenda pembahasan mengenai rencana penggunaan sidik jari (finger print) untuk log in user dan otorisasi transaksi pada core banking system. 3. Agenda pembahasan mengenai pencapaian rencana bisnis bank atas indikator keuangan penting sampai dengan bulan April 2021. 4. Keputusan untuk teknis pelaksanaan pengalihmediaan dan finger print akan dikoordinasikan kepada bagian terkait dan vendor core banking system serta tata cara dan teknis tersebut akan dituangkan secara tertulis dalam SOP dan SK Direksi. 5. Keputusan untuk strategi mengoptimalkan pencapaian dan pertumbuhan kinerja bank
4	04/08/2021	1. Welly Sucipto 2. Lunto Hasan 3. Afit Syidik Priyatna 4. Rudy Hasanudin 5. Fitri Yanti 6. Cinthya Liany Wijaya	1. Agenda pembahasan mengenai penyesuaian syarat dan ketentuan penyelenggaraan group arisan happy 3. 2. Keputusan bahwa seluruh peserta menyetujui penyesuaian syarat dan ketentuan penyelenggaraan group arisan happy 3.
5	13/09/2021	1. Welly Sucipto	1. Agenda pembahasan mengenai pencapaian rencana bisnis bank atas indikator keuangan penting sampai dengan bulan Agustus 2021.

No	Tanggal	Peserta Rapat Gabungan	Topik/Materi Pembahasan
		2. Lunto Hasan 3. Afit Syidik Priyatna 4. Rudy Hasanudin 5. Fitri Yanti 6. Cinthya Liany Wijaya	2. Agenda pembahasan mengenai optimalisasi penghimpunan dana ketiga khususnya tabungan. 3. Agenda pembahasan mengenai evaluasi kembali model bisnis BPR yang sesuai dengan skala bisnis BPR khususnya berkaitan dengan strategi bisnis yang dibutuhkan. 4. Agenda Pembahasan pemenuhan tata Kelola bank terkait Governance Structure yang belum terpenuhi. 5. Agenda pembahasan mengenai rencana penyediaan layanan ATM Cardless dan Mobile Banking. 6. Agenda pembahasan mengenai penanganan kredit bermasalah guna menekan NPL bank. 7. Keputusan untuk mengoptimalkan pencapaian dan pertumbuhan kinerja bank kedepan, meningkatkan fungsi ALCO dalam mengoptimalkan pengelolaan dana. Serta melakukan langkah strategis guna meningkatkan penghimpunan dana pihak ketiga tabungan. 8. Keputusan penambahan Direktur Bisnis dapat terealisasi paling lambat semester I Tahun 2022. Pemenuhan Komisaris Independen dilakukan setelah penambahan Direktur Bisnis. 9. Keputusan untuk rencana penyelenggaraan kegiatan layanan ATM Cardless dan Mobile Banking saat ini bank telah melakukan penjajakan kerjasam dengan beberapa bank umum dan vendor-vendor pendukung kegiatan tersebut. 10. Keputusan untuk penyelesaian NPL terhadap debitur inti, bank terus melakukan upaya-upaya penyelesaian. Bank tetap melakukan upaya-upaya penangan kredit bermasalah.
6	30/11/2021	1. Welly Sucipto 2. Lunto Hasan 3. Afit Syidik Priyatna 4. Rudy Hasanudin 5. Fitri Yanti 6. Cinthya Liany Wijaya	1. Agenda pembahasan mengenai penyesuaian suku bunga dan ketentuan umum kredit PKSG dan KPSG. 2. Keputusan untuk melakukan penyesuaian suku bunga dan ketentuan umum kredit PKSG dan KPSG yang diajukan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris secara tertulis.
7	14/12/2021	1. Welly Sucipto 2. Lunto Hasan 3. Afit Syidik Priyatna 4. Rudy Hasanudin 5. Fitri Yanti 6. Cinthya Liany Wijaya	1. Agenda pembahasan mengenai penyusunan Rencana Bisnis Bank Tahun 2022. 2. Agenda Pembahasan pemenuhan tata Kelola bank terkait Governance Structure yang belum terpenuhi. 3. Agenda Rencana pengembangan teknologi Informasi layanan digital perbankan khususnya ATM Cardless dan Mobile Banking. 4. Keputusan Bahwa Dewan Komisaris menyetujui Rencana Bisnis Bank Tahun 2022. 5. Keputusan kandidat Calon Direktur Bisnis yang telah disetujui dan tertuang dalam RUPS tanggal 07 Desember 2021.

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris selalu hadir dalam setiap Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi yang diselenggarakan di tahun 2021.

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran **) (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Welly Sucipto	19	-	100%
2	Lunto Hasan	19	-	100%
3	Afit Syidik Priyatna	19	-	100%

I. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Sepanjang tahun 2021 tidak terdapat penyimpangan internal, baik yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai Tetap, maupun Pegawai Tidak Tetap.

Jumlah Penyimpangan Internal Dalam 1 Tahun	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Total <i>Fraud</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

J. Permasalahan Hukum Yang Dihadapi

Sepanjang tahun 2021 BPR Utomo tidak terdapat permasalahan hukum dengan pihak manapun.

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam Proses Penyelesaian	-	-
Total	-	-

K. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Sepanjang tahun 2021 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Penerima Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan*)
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
-	-	-	-	-	-	-	-

*) kesesuaian dengan sistem dan prosedur yang berlaku dan keterkaitan antara yang memiliki benturan kepentingan dengan penerima keputusan

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial Dan Kegiatan Politik

Selama periode tahun 2021 BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung hanya memberikan dana untuk kegiatan sosial saja berupa pemberian beberapa hewan kurban, perayaan HUT RI, bantuan sembako bagi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 dan kegiatan sosial lainnya.

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
1	10/03/2021	Sosial	Pemasangan Lilin di Vihara Senopati	Vihara Senopati	700.000
2	16/03/2021	Sosial	Peringatan Hari Besar Islam	Masjid Babul Khoir (Metro)	200.000
3	29/06/2021	Sosial	Kegiatan Bakti Sosial Khitanan Massal	Karang Taruna Imopuro (Metro)	200.000
4	14/07/2021	Sosial	Hewan Kurban (hari raya Idul Adha)	Mushola Miftahnul Jannah	3.500.000
5	15/07/2021	Sosial	Hewan Kurban (hari raya Idul Adha)	Bapak Udi Pasoyo	3.000.000
6	15/07/2021	Sosial	Hewan Kurban (hari raya Idul Adha)	Masjid Nurul Muttaqin (Bapak Zakkie)	3.300.000
7	15/07/2021	Sosial	Hewan Kurban (hari raya Idul Adha)	Masjid Al-Amiin (Bapak Sarwani)	3.500.000
8	16/07/2021	Sosial	Hewan Kurban (hari raya Idul Adha)	Masjid Babussalam (Kampung Banjang Sari)	3.000.000
9	19/07/2021	Sosial	Hewan Kurban (hari raya Idul Adha)	Majid Nurul Iman (Bapak Sarjono)	3.000.000
10	19/07/2021	Sosial	Hewan Kurban (hari raya Idul Adha)	Mushola Al-Ikhsan	3.500.000
11	19/07/2021	Sosial	Hewan Kurban (hari raya Idul Adha)	Masjid Al-Wusto	3.500.000
12	19/07/2021	Sosial	Hewan Kurban (hari raya Idul Adha)	Masjid Al-Abu Rahman	3.500.000
14	19/07/2021	Sosial	Hewan Kurban Kantor Cabang Metro	Masjid Babul Khoir	3.500.000
15	10/08/2021	Sosial	Bantuan Sembako untuk Masyarakat yang terdampak Covid-19	Sekretariat Kota Bandar Lampung	4.980.000
16	16/08/2021	Sosial	HUT Kemerdekaan RI ke 76 Tahun	RW 01 Kel Imopuro Kec. Metro Pusat	95.000
17	16/12/2021	Sosial	Kegiatan Muktamar NU ke 34 Tahun	Sekda Kabupaten Lampung Tengah	250.000
Jumlah Dana					39.725.000

BAB III

LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*A. HASIL PENILAIAN (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA

No	Faktor yang dinilai	Peringkat	Bobot (B)	Nilai
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1,19	20,0%	0,24
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1,42	12,5%	0,18
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	1,50	2,5%	0,04
4	Penanganan Benturan Kepentingan	1,50	10,0%	0,15
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	1,77	10,0%	0,18
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	1,63	10,0%	0,16
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1,10	2,5%	0,03
8	Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2,34	10,0%	0,23
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	1,90	7,5%	0,14
10	Rencana Bisnis BPR	1,83	7,5%	0,14
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1,85	7,5%	0,14
Nilai Komposit			100,0%	1,62
Peringkat Komposit		Sangat Baik		

B. UMUM HASIL PENERAPAN TATA KELOLA

Manajemen BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum relatif baik. Hal ini tercermin dari beberapa upaya untuk memenuhi prinsip-prinsip Good Corporate Governance mulai dari kelengkapan struktur, kebijakan dan prosedur, penetapan limit risiko hingga mengupayakan mencapai hasil yang maksimal. Beberapa kendala atau kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance yang ditemukan akan segera dilakukan perbaikan semaksimal mungkin oleh manajemen BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung di periode berikutnya.

Berdasarkan analisis Penilaian Sendiri (*self assessment*) terhadap aspek *Governance Structure*, *Governance Process*, dan *Governance Outcome* pada masing-masing Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG diperoleh nilai komposit sebesar **1,62** dengan peringkat komposit adalah "**Sangat Baik**", yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aspek *Governance Structure* Tata Kelola pada seluruh Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG yang seluruhnya telah hampir dilengkapi sejak tahun 2017, fungsinya telah berjalan dengan cukup hingga tahun 2021. BPR berkomitmen akan melengkapi komposisi komisaris independen sesuai tuntutan peraturan Otoritas di tahun 2022;
2. Aspek *Governance Process* Tata Kelola pada sebagian besar Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG cukup efektif karena telah didukung oleh struktur dan infrastruktur (*Governance Structure*) yang cukup lengkap. BPR berusaha melakukan perbaikan dan penyempurnaan atas kelemahan dan kekurangan pada proses manajemen risiko dari periode ke periode agar

- dapat memberikan hasil yang maksimal bagi penerapan tata kelola BPR yang baik;
3. Aspek Governance Outcome Tata Kelola pada Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG yang dihasilkan dari aspek Governance Process telah cukup memadai dan sebagian besar berjalan cukup efektif berkat dukungan struktur dan infrastruktur (governance structure) yang cukup lengkap.

Bandar Lampung, 27 April 2022

PT. BPR UTOMO MANUNGGAL SEJAHTERA LAMPUNG

Menyetujui



Welly Sucipto
Komisaris Utama



Rudy Hasanudin
Direktur Utama



Fitri Yanti
Direktur Kepatuhan